



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Senin 3 Maret 2025



RINGKASAN BERITA HARI INI

Potensi PAD Sidoarjo Rp 5 Miliar dari Sewa Aset Melayang Tak Terurus

Editor: Fathur Roziq

2 Maret 2025 06:24



Anggota Badan Anggaran DPRD Sidoarjo Bangun Winarso. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Komisi D DPRD Sidoarjo Harapkan PKH Benar-Benar Tepat Sasaran dan Berbasis Data Valid

Editor: Fathur Roziq

1 Maret 2025 09:59



Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudiori membantu Satuan yang hendak mengantre untuk dapat bantuan PKH di kantor Kecamatan Candi pada Kamis (27 Februari 2025). (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Istri Bupati Sidoarjo Hj. Sriatun Resmi Dilantik Sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo

Media Sorot Mata 2 Maret 2025



Tekan Lonjakan Harga, Pemkab Siapkan Operasi Pasar

Memasuki bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di Sidoarjo mengalami kenaikan. Salah satu komoditas yang terdampak adalah cabai di berbagai pasar tradisional.

BERDASARKAN data dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskapberpok) Jawa Timur, harga cabai merah keriting mengalami kenaikan sebesar Rp 9.500 per kilogram, dari Rp 44.500 menjadi Rp 54.000 per kilogram. Hal serupa terjadi pada cabai merah besar yang naik Rp 2.500 per kilogram, dari sebelumnya Rp 47.500 menjadi Rp 50.000



HARGA NAIK: Pedagang sayur mayur di Pasar Larangan ikut merasakan kenaikan harga sejumlah bahan pokok.

Komisi C DPRD Anggarkan Rp 35 Miliar Atasi Banjir Sidoarjo

by ZonaJatim00 — 28 Februari 2025 in Daerah



FOTO POLRESTA SIDOARJO

Jaga Ramadan Kondusif

KASAT Samapta Polresta Sidoarjo Kompol Yudhi Prastio (tiga dari kanan) meminta resepsionis Hotel Delta Sinar Mayang di Jalan Diponegoro agar tidak sembarangan menerima tamu. Polresta Sidoarjo bersama instansi terkait menggelar patroli gabungan ke hotel, cafe dan tempat karaoke Sabtu (1/3) malam. (*)

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan
Sekretariat DPRD Sidoarjo

Radarsidoarjo

RADAR SIDOARJO | SENIN, 3 MARET 2025 | HALAMAN 10

OPINI

Efisiensi sebagai Pondasi Efektivitas Anggaran

Paradoks Kebijakan Efisiensi

KEBIJAKAN efisiensi anggaran yang diampu Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 melahirkan beragam reaksi dari masyarakat. Sebab tidak tanggung-tanggung nilai yang diefisieni, yakni sekitar Rp 306,69 triliun yang berasal dari belanja Kementerian/Lembaga (Rp 256,1 triliun) serta transfer ke daerah (Rp 50,59 triliun). Efek remesannya terus mengalir dengan mendorong penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya pada pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Kebijakan belanja daerah diinstruksikan agar membatasi kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/FGD. Belanja perjalanan dinas dipangkas hingga 50 persen. Pemerintah Daerah juga diminta mengurangi besaran honorarium, belanja yang bersifat pendukung dan tidak

memiliki output terukur, serta lebih selektif dalam memberikan hibah.

Sangat wajar bila respon masyarakat berkecamuk. Apalagi ingatan publik masih hangat dengan retentasi isu, mulai dari struktur "Kabinet Gemoy" yang dipandang inefisien, terbitnya SHGB laut, hingga dampak subsidi elpiji. Mahasiswa pun sudah melakukan aksi turun jalan bertagor #IndonesiaGelap. Lalu, bagaimana sebaiknya cara kita bersikap?

Efisiensi dan Efektivitas Dalam pandangan penulis, sejauhmana ada sisi baiknya juga ihwal efisiensi anggaran, terutama kaitannya dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD per tahun. SiLPA menandakan jumlah belanja yang tidak mampu diserap sekaligus menakar anggaran. Semakin besar SiLPA, maka dapat dikatakan semakin tidak efektif perencanaan anggaran.

Berdasarkan olah data dari Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemendagri, dalam kurun waktu

2019-2023, rasio SiLPA terhadap Belanja Daerah seluruh APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia rata-rata mencapai 8,51 persen per tahun. Bila cakupannya kita pilah, maka rata-rata SiLPA Provinsi sebesar 9,99 persen dan Kabupaten/Kota sebesar 8,40 persen per tahun. Dalam lingkup Jawa Timur, Pemprov Jatim memiliki rata-rata SiLPA sebesar 13,17 persen dan Kabupaten/Kota sebesar 15,10 persen per tahun. Kabupaten Sidoarjo sendiri tergolong relatif tinggi angka SiLPA-nya, yakni rata-rata 17,70 persen per tahun.

Rasio SiLPA yang tergolong besar tersebut yang amat perlu kita sayangkan. Bayangkan saja, jika seluruh APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota tahun 2023 kita akumulasikan, nilainya mencapai Rp1.319,63 triliun. Dengan asumsi rata-rata SiLPA sebesar 8,51 persen, maka terdapat Rp 112,3 triliun yang "gagal" berputar sebagai mesin pembangunan pada tahun 2023. Fantastis!

Kita tentu mengingat pernah juga dipaksa berhemat



Oleh:
Muh. Zakaria Dimas Pratama, S.Kom
Ketua Fraksi Demokrat-NasDem
DPRD Sidoarjo
Anggota Banggar DPRD Sidoarjo

pada saat pandemi Covid-19 dengan melakukan refocusing anggaran besar-besaran tahun 2020-2022. Nah menariknya, justru pada tahun 2020 rata-rata SiLPA seluruh daerah bisa ditekan hingga 7,61 persen. SiLPA memang perlu terus ditekan agar anggaran yang tersedia dapat lebih maksimal untuk mendanai pembangunan daerah.

Terlepas dari itu semua, ada beberapa hal yang sepatutnya menjadi perhatian dalam pengelolaan

anggaran publik.

Pertama, jangan sampai efisiensi mematikan atau menurunkan standar pelayanan publik, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, keamanan, serta penanggulangan bencana.

Kedua, efektivitas belanja daerah perlu disandingkan dengan efisiensi. Jadi, tidak cukup sekadar hemat, tetapi juga perlu tepat (sasaran). Tidak cukup sekadar terserap, tetapi juga perlu berdampak. Belanja daerah sudah seharusnya didesain lebih bertenaga untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Ketiga, dengan adanya keterbatasan anggaran, maka seyogianya pemerintah juga perlu menetapkan skala prioritas dan mengalih potensi pembiayaan alternatif. Penulis mengapresiasi keberanian Pemerintah Pusat dengan mendirikan Danantara untuk mengelola aset dan kekayaan negara. Kabarnya, Danantara didesain sebagai Super Holding BUMN layaknya

Temasek di Singapura untuk mendukung proyek-proyek strategis nasional. Memang dengan adanya keterbatasan APBN/APBD, kita amat membutuhkan berbagai skema pembiayaan alternatif, termasuk melalui optimalisasi BUMN dan BUMD.

Keempat, membangun serta menjaga kredibilitas dan akuntabilitas sebagai modal sosial antara pemerintah dan rakyat. Secara politik, pemerintah memang berhak dan bebas mengelola anggaran sesuai dengan kebijakan perundang-undangan. Namun, jangan lupa bahwa sumber pendanaan terbesar masih berasal dari pungutan pajak. Jika pemerintah gagal menjaga kredibilitasnya, maka jangan heran bila masyarakat akan semakin enggan membayar kewajiban pajaknya. Apalagi tahun kemarin rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB kita menurun dari tahun 2023 sebesar 10,31 persen menjadi hanya sebesar 10,08 persen.

Jika teori yang sama kita gunakan untuk mengukur

rasio pajak daerah (local tax ratio) terhadap PDRB, maka akan terlihat bahwa kinerja penerimaan pajak daerah kita masih relatif sangat kecil. Local tax ratio kabupaten/kota di Jawa Timur dalam kurun waktu 2021-2023 baru mencapai rata-rata sebesar 0,37 persen. Kabupaten Sidoarjo sendiri sebagai salah satu kekuatan ekonomi Jawa Timur memiliki rata-rata local tax ratio hanya sebesar 0,49 persen per tahun.

Dari hasil tersebut, indikasinya semakin kuat bahwa pemerintah masih banyak yang mengantungkan pembiayaan pembangunannya di luar pajak Pemerintah Pusat maupun Daerah, misalnya dari kebijakan utang atau dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah wajib peka dan responsif untuk melayani kebutuhan masyarakat sebagai "Sang Tuan". Dengan kian kuatnya modal sosial antara pemerintah dengan rakyat, maka diharapkan gotong-royong dan engagement dalam pembangunan bisa berjalan semakin erat dan hebat. (*)



Tekan Lonjakan Harga, Pemkab Siapkan Operasi Pasar

Memasuki bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di Sidoarjo mengalami kenaikan. Salah satu komoditas yang terdampak adalah cabai di berbagai pasar tradisional.

M Saiful Rohman,
Wartawan Radar Sidoarjo

BERDASARKAN data dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jawa Timur, harga cabai merah keriting mengalami kenaikan sebesar Rp 9.500 per kilogram, dari Rp 44.500 menjadi Rp 54.000 per kilogram.

Hal serupa terjadi pada cabai merah besar yang naik Rp 2.500 per kilogram, dari sebelumnya Rp 47.500 menjadi Rp 50.000 per kilogram.

Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit merah, yang melonjak hingga Rp 12.500 per kilogram. Sebelumnya, harga cabai rawit merah berada di angka Rp 85.000 per kilo-



FENOMENA

HARGA NAIK: Pedagang sayur mayur di Pasar Larangan ikut merasakan kenaikan harga sejumlah bahan pokok.

Rp 97.500 per kilogram.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo, Widiyantoro Basuki, menyatakan bahwa, meski harga cabai melonjak, harga kebutuhan pokok lain-

“Harga kebutuhan pokok lainnya masih relatif stabil dan tidak mengalami lonjakan signifikan, kecuali cabai,” ujarnya, Minggu (2/3).

Untuk menekan lonjakan harga, Pemkab Sido-

operasi pasar selama bulan Ramadan.

“Kami akan mengadakan operasi pasar dan pasar murah sepanjang bulan Ramadan agar ketersediaan bahan pokok tetap tercukupi dan harga tetap

Selain operasi pasar yang dilakukan Disperindag Sidoarjo, pemerintah pusat juga akan turun tangan dengan menggelar operasi pasar serupa guna menekan harga bahan pokok.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

LANGGANAN & IKLAN

Jl. Raya Tebel no:12,
Tebel Tengah, Gedangan

Telp: 031-58280826

redarsidoarjo@gmail.com

WEB www.redarsidoarjo.jawapos.com

Kupang Lontong

Lek ngerem motor
ojo ndadak, nubruk
becak iso lemes

Lombok regane
mundak, rasane pedes
kantong ludes



BERIBADAH: Suasana pemberangkatan Calon Jamaah Haji di Bandara Internasional Juanda tahun lalu. IST

1.507 CJH Belum Lunasi BIPIH Tahap Pertama

KOTA - Sebanyak 1.309 Calon Jamaah Haji (CJH) asal Sidoarjo telah menyelesaikan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BIPIH) tahap pertama. Jumlah tersebut merupakan bagian dari proses pelunasan yang dibuka sejak 14 Februari lalu.

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Sidoarjo, Khoidar, mengungkapkan bahwa total ada 2.816 CJH yang berhak melunasi BIPIH pada tahap pertama. Dengan demikian, masih ada 1.507 jamaah yang belum menyelesaikan kewajibannya.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.980 CJH telah memenuhi syarat istitha’ah atau dinyatakan layak untuk berangkat haji,” ujarnya kepada Radar Sidoarjo, Minggu (2/3).

Tahun ini, Sidoarjo

mendapatkan kuota haji reguler sebanyak 2.757 jamaah. Selain itu, terdapat tambahan kuota khusus bagi lansia sebanyak 59 orang.

“Selain kuota utama, terdapat 717 jamaah yang masuk dalam daftar cadangan keberangkatan,” tambahnya.

Jumlah kuota haji Sidoarjo tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024, yang hanya mendapat 2.478 jamaah.

“Saat ini, kami masih fokus pada penyelesaian pelunasan BIPIH tahap pertama yang akan ditutup pada 14 Maret mendatang. Setelah tahap ini selesai, kami akan mempercepat proses pengurusan paspor bagi calon jamaah yang akan berangkat,” jelasnya.

Khoidar mengimbau para CJH yang sudah memenuhi syarat

Seminggu Banjir, Warga Tanggulangin Timur Butuh Posko Pengungsian dan Air Bersih

Enam Desa Masih Banjir 30-50 Sentimeter

SIDOARJO - Banjir setinggi 30 hingga 50 sentimeter masih menggenangi enam desa di Kecamatan Tanggulangin. Sudah seminggu, ketinggian air di sana malah semakin naik. Pantauan *Jawa Pos* kemarin (2/3) di Dusun Polgunting, Desa Gempolsari, sejumlah warga nampak tidak banyak melakukan aktivitas. "Sudah sejak seminggu ini, rumah saya kebanjiran, jadi kegiatannya hanya duduk-duduk, untung kasur ada dipannya, jadi tidak basah," kata Muallimah, warga RT 15 RW 04.

Bukan hanya aktivitas yang terhalang. Akses keluar masuk desa juga tidak bisa ditempuh dengan kendaraan. Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gempolsari

Khusnul Karim mengatakan hampir semua wilayah desa-desa terendam banjir. "Ada empat RW terdampak, yang berarti ada 500 lebih keluarga terdampak banjir ini," katanya. Menurut Karim banjir tersebut karena naiknya air sungai serta diduga ada rembesan dari tanggul lumpur. "Senin (24/2) itu banjir tapi sedikit, tapi makin lama makin dalam," ujarnya.

Karim mengatakan banyak warga, khususnya lansia memilih untuk tetap di rumah. Sejumlah warga terpaksa tinggal di rumah karena tidak adanya posko pengungsian dan tidak ada keluarga yang menjemput. "Mau dijemput juga aksesnya susah karena terendam. Banjirnya tinggi semua, motor banyak yang mogok-jelasnya," ujarnya.

Selama seminggu banjir, Karim mengatakan belum ada bantuan dari Pemkab. Baik

WILAYAH TANGGULANGIN YANG TERENDAM BANJIR

Desa Gempolsari	ketinggian air +/- 50 cm
Desa Kalidawir	ketinggian air +/- 30 cm
Desa Kedungbanteng	ketinggian air +/- 20 cm
Desa Banjarsari	ketinggian air +/- 25 cm
Desa Kailitengah	ketinggian air +/- 30 cm
Desa Kalisampurno	ketinggian air +/- 25 cm

Sumber: Kecamatan Tanggulangin

pembangunan posko pengungsian, pengecekan kesehatan, hingga bantuan makanan dan air bersih. "Kalau air bersih jelas terdampak, karena sumur jadi kotor. Banjir ini jelas susah untuk air bersih," paparnya.

Selain di Desa Gempolsari, Desa Kalidawir dan sekitarnya juga banjir. Meski begitu genangan hanya berkisar 30 sentimeter. Karim juga mengatakan banjir bukan hanya merendam rumah tapi juga sawah hingga tambak warga. "Harapannya kita bisa segera ada bantuan," katanya.

Camat Tanggulangin Sabino Mariano mengatakan desa-desa di sisi timur Tanggulangin mengalami banjir. Sabino menduga bahwa banjir berasal dari limpahan air selepas hujan deras di sisi barat. "Dua hari lalu di Kecamatan Krembung banjir, sekarang surut. Nah airnya ke sini dan ke Kecamatan Candi," katanya. Terkait keluhan warga soal bantuan, Sabino mengungkapkan masih akan berkoordinasi dengan Pemkab Sidoarjo terutama dengan Dinas Sosial. (ezza/uzi)



AWET: Warga Gempolsari terpaksa menuntun sepedanya karena banjir masih setinggi 50 sentimeter di Polo Gunting, Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin kemarin (2/3).

Jawa Pos

Pemkab Gerak Cepat Pantau Titik Banjir

Sidoarjo, Memorandum

Curah hujan tinggi yang mengguyur dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banjir di Kecamatan Tanggulangin. Sebanyak 17 desa terendam air, dengan ketinggian mencapai 60 hingga 70 cm di beberapa titik.

"Banjir ini merupakan dampak dari curah hujan yang tinggi serta kiriman air dari wilayah lain. Beberapa desa di bagian timur Tanggulangin terdampak cukup parah," kata Camat Tanggulangin Sabino Mariano, Minggu (2/3).

Warga berharap akses transportasi segera ditangani Pemkab agar mereka dapat beraktivitas seperti biasa. "Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi banjir dan memberikan bantuan yang dibutuhkan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak," sebut Ketua BPD Gempolsari, Khusnul Karim



Wabup Mimik Idayana memantau banjir di kawasan Candi.

yang menyebutkan wilayahnya terdampak paling parah.

Sehari sebelumnya, Wakil Bupati (Wabup) Mimik Idayana memantau dampak banjir di Desa Balongdowo, Desa Balonggabus, Kecamatan Candi dan Perumahan Bumi Citra Fajar Golf di Kecamatan Sidoarjo. Mimik meminta OPD terkait penanganan bergerak cepat agar sekitar 500 warga yang

terdampak banjir dapat segera beraktivitas.

"Apa yang menjadi keluhan warga segera ditangani, penambahan pompa untuk menyedot bisa ditambahkan karena pompa yang sudah ada tidak mencukupi. Saya mohon kepada warga untuk lebih bersabar lagi karena musibah ini karena faktor alam, air laut masih meluap namun pemerintah

akan terus berupaya meringan dampak bagi warga," terang Mimik Idayana.

Selain menampung keluhan warga, Pemkab juga menyalurkan bantuan berupa sembako dan BBM jenis solar untuk operasional rumah pompa. Mimik menegaskan penanganan banjir tidak hanya berhenti pada penyaluran bantuan semata. Pemkab, sambungnya, akan terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk mencari solusi jangka

panjang guna mengantisipasi terulangnya bencana serupa di masa mendatang.

"Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait penyebab banjir ini, termasuk normalisasi sungai dan saluran air yang tersumbat. Kami juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan di musim penghujan ini," tutup Mimik. (sud/jok/epe)

KEHILANGAN :

Telah Hilang Surat Bukti / Dokumen Surat Tanah.

Diantaranya:

1. IPEDA Nomor Kohir / C 3625 Persil 136 Klas D II Luas +_ 200 m²

KEHILANGAN :

Telah Hilang Surat Bukti / Dokumen Surat Tanah. Diantaranya:

1. IPEDA Nomor Kohir / C 129 Persil 75 Klas D II Luas +_ 300 m² atas nama Sdr. Yatinah B. Tiah
2. IPEDA Nomor Kohir / C 130 Persil 75 Klas D II Luas +_ 230 m² atas nama Yatinah B Kaerah.

Wajah Kota Sidoarjo Dihiasi dengan Tanaman Pohon Pule

Sidoarjo, Bhirawa

Tanaman pohon-pohon Pule, saat ini mulai banyak menghijaukan wajah Kota Sidoarjo. Salah satunya, di pintu exit Tol Kota Sidoarjo. Di lokasi masuk Kota Sidoarjo itu, dua pohon pule ukuran sedang, Jum at pagi (28/2) akhir pekan lalu, telah ditanam oleh para PNS Sidoarjo pada saat kegiatan kerja bhakti massal.

Hadir dalam kesempatan itu, istri Bupati Sidoarjo, Sriatun Subandi, Sekdakab Sidoarjo Feny Apridawati, dan sejumlah pimpinan OPD bersama para staf. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo, Bahrul Amiq, mengatakan penanaman pohon pule tersebut sebagai upaya membenahi wajah Kota Sidoarjo. Agar wajah Kota Sidoarjo lebih nampak cantik, asri, dan nyaman dipandang mata.

Menurut Bahrul Amiq, saat ini wilayah Kota Sidoarjo mulai banyak ditanami pohon-pohon Pule, dikarenakan keistimewaan dari pohon tersebut. Diantaranya, selain sebagai pohon peneduh yang rindang dan bisa mengurangi polusi udara, pohon ini akarnya kuat, sehingga tidak sampai merusak infrastruktur di bawahnya. [kus.ca]

HARIAN
Bhirawa

Kapolsek Tulangan



Kapolsek Tulangan AKP. Abdul Cholil mengunjungi warga yang
derita keterbatasan fisik

Bantu Penyandang Cerebral Palsy

SIDOARJO - Kapolsek Tulangan, AKP Abdul Cholil, menunjukkan kepeduliannya kepada warga dengan mengunjungi Sugiono, seorang penyandang cerebral palsy yang telah mengalami keterbatasan fisik selama 34 tahun. Kunjungan ini dilakukan setelah pihak kepolisian menerima informasi dari Bhabinkamtibmas Desa Kepatihan mengenai kondisi Sugiono.

Dalam kunjungan yang berlangsung di rumah Sugiono, yang berlokasi di Dusun Kedurus, Desa Kepatihan, AKP Abdul Cholil bersama anggotanya memberikan paket sembako sebagai bentuk dukungan. Pertemuan berlangsung hangat, diwarnai dengan obrolan serta doa untuk kesehatan Sugiono.

“Tetap semangat, rajin beribadah, dan berdoa kepada Allah. Semoga senantiasa diberi kesehatan,” ujar AKP Abdul Cholil pada Minggu (2/3/25).

Selain memberikan bantuan, Kapolsek Tulangan juga meminta doa dari Sugiono serta warga sekitar agar situasi di wilayah hukumnya tetap aman dan kondusif. ●

Banjir, Polisi Turun Tangan

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Kapolsek Candi Kopol Eka Anggriana dan anggota mengecek genangan air yang melanda kawasan Perumahan Sentra Alam, Wedoro Klurak, Candi, Sidoarjo, Sabtu 1 Maret 2025 malam.

Kapolsek Candi didampingi wakapolsek, kanitreskim, anggota dan perangkat desa setempat di lokasi saling berkoordinasi, bila volume genangan air semakin meningkat untuk dapat mengaktifkan penyedotan air menggunakan pompa diesel:

“Saat ini genangan air sudah mulai menyusut. Sebagai antisipasi bila terjadi hujan deras kami siapkan pompa air,” ujar Kopol Eka Anggriana.

Selain itu, polisi juga menyampaikan sejumlah pesan kamtibmas. Seperti mengawasi anak-anak untuk tidak bermain di dekat sungai, menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah di aliran air dan sebagainya. (md/rus)



Polisi turun ke lokasi banjir Candi.

Warga 17 Desa yang Kebanjiran Kesulitan Akses dan Butuh Bantuan

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Curah hujan tinggi yang mengguyur Sidoarjo dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banjir di Kecamatan Tanggulangin. Sebanyak 17 desa terendam air, dengan ketinggian mencapai 60 hingga 70 cm di beberapa titik.

“Banjir ini merupakan dampak dari curah hujan yang tinggi serta kiriman air dari wilayah lain. Beberapa desa di bagian timur Tanggulangin terdampak cukup parah,” kata Camat Tanggulangin, Sabrino Mariano, Minggu (2/3/2025).

Desa yang mengalami dampak paling parah di antaranya adalah Gempolsari, Kedungbanteng, Banjarasri, Kalidawir, dan Banjarpanji. Sejumlah warga mengaku kesulitan beraktivitas akibat banjir yang telah berlangsung lebih dari sepekan.

“Banjir ini sebetulnya sudah lama mulai bulan Januari, namun banjir sempat surut, kemudian di awal bulan Maret kembali banjir. Kami sebelumnya sudah pernah memberikan bantuan sembako dan obat-obatan,” jelas Sabrino.

Muslimah (53) warga Dusun Polo Gunting RT 15, RW 4 Desa Gempol Sari mengaku bahwa banjir ini sejak seminggu lalu, ini merupakan banjir yang terparah. Dirinya



Terendam Banjir, Warga Sidoarjo mulai kesulitan akses dan butuh bantuan.

berharap mendapatkan bantuan sembako, dan air bersih. “Sudah seminggu rumah saya terendam, jadi aktivitas sangat terbatas. Untungnya kasur masih bisa diselamatkan dengan dipan. banyak warga yang mengungsi di familinya,” kata Muslimah.

Ketua BPD Gempolsari, Khusnul Kharim, mengatakan hampir seluruh wilayah desa terendam banjir dengan dampak yang cukup luas. Banjir juga menyebabkan akses jalan terganggu, bahkan kendaraan bermotor banyak yang mogok akibat terendam air.

“Ada empat RW yang terdampak, mencakup lebih dari 500 keluarga. Selain berasal dari luapan sungai, kami menduga ada rembesan dari tanggul lumpur yang memper-

parah kondisi,” kata Khusnul. Hingga saat ini menurut Khusnul warga masih bertahan di rumah masing-masing, termasuk lansia, karena belum adanya posko pengungsian maupun bantuan dari pemerintah daerah.

“Belum ada bantuan dari pemkab, baik itu posko pengungsian, layanan kesehatan, maupun logistik seperti makanan dan air bersih. Kami berharap ada perhatian lebih terhadap kondisi warga yang kesulitan,” imbuh Khusnul.

“Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi banjir dan memberikan bantuan yang dibutuhkan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak,” pungkasnya. (md/rus)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Wabup Bersama Forkopimda Sidoarjo Bantu Korban Banjir

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana membantu masyarakat yang terdampak banjir di Desa Balongdowo, Desa Balonggabus, Kecamatan Candi dan Perumahan Bumi Citra Fajar Golf Kecamatan Sidoarjo.

Meski tengah menjalankan ibadah Puasa, Mimik Idayana bersama Forkopimda Sidoarjo tetap bersemangat menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan, Sabtu 1 Maret 2025.

Mimik meminta OPD terkait penanganan bergerak cepat agar musibah cepat ditangani karena selama hampir sepekan sebanyak kurang lebih 500 warga yang terbagi menjadi 3 RT terendam banjir.

“Apa yang menjadi keluhan warga monggo segera ditangani, penambahan pompa untuk menyedot bisa ditambahkan karena

penambahan pompa untuk menyedot bisa diantarkan karena pompa yang sudah ada tidak mencukupi, dan saya mohon kepada warga untuk lebih bersabar lagi karena musibah ini karena faktor alam, air laut masih meluap namun pemerintah akan terus berupaya meringan dampak bagi warga," ujarnya.

"Monggo bersurat saja ke dinas PUBM untuk bantuan solar nanti akan kita bantu dan untuk bantuan mobil pompa akan didatangkan," jelasnya.

Mimik menegaskan penanganan banjir tidak hanya berhenti pada penyaluran bantuan semata. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk mencari solusi jangka panjang guna mengantisipasi terulangnya bencana serupa di masa mendatang.

"Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait penyebab banjir ini, termasuk normalisasi sungai dan saluran air yang tersumbat. Kami juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan di musim penghujan ini," tutur Mimik. (md/rus)



Korban banjir menerima bantuan.



Aparat gabungan menggelar patroli bersama menyasar tempat hiburan malam.

Patroli Gabungan Sasar Tempat Hiburan di Sidoarjo

Sidoarjo - HARIAN BANGSA
Personel gabungan di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (1/3/2025) malam, menggelar patroli bersama guna terwujudnya situasi yang aman dan kondusif di Bulan Ramadhan.

PATROLI melibatkan personel Polri, TNI dan Satpol

PP tersebut menyasar tempat-tempat hiburan, kafe dan pusat belanja. Selain itu adanya patroli ini juga guna mencegah terjadinya tindak kriminalitas, peredaran narkoba, miras, balap liar, sajam hingga tawuran antar kelompok.

Kasat Samapta Polresta

Sidoarjo Kopol Yudhi Prastio turun langsung, memimpin pelaksanaan patroli sebagai langkah preventif dari terjadinya gangguan kamtibmas di tengah masyarakat menjalankan ibadah puasa Ramadhan.

Ia menjelaskan, di awal Ramadhan bersamaan saat akhir

pekan, personel gabungan melakukan patroli kamtibmas dengan berkeliling sejumlah kawasan ramai aktifitas warga. Termasuk mendatangi sejumlah tempat-tempat hiburan malam yang beroperasi di bulan Ramadhan.

"Dengan adanya patroli kamtibmas sebagai langkah preven-

tif dari berbagai gangguan seperti kriminalitas, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, miras, sajam serta tindakan lainnya diharapkan dapat menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah di Bulan Ramadhan," jelas Kopol Yudhi Prastio. (cat/rus)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PATROLI



FOTO POLRESTA SIDOARJO

Jaga Ramadan Kondusif

KASAT Samapta Polresta Sidoarjo Kompol Yudhi Prastio (tiga dari kanan) meminta resepsionis Hotel Delta Sinar Mayang di Jalan Diponegoro agar tidak sembarangan menerima tamu. Polresta Sidoarjo bersama instansi terkait menggelar patroli gabungan ke hotel, cafe dan tempat karaoke Sabtu (1/3) malam. (*)

Jawa Pos

1.309 CJH Lunasi BiPIH di Tahap Pertama

SIDOARJO - Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Sidoarjo masih membuka pelunasan tahap pertama Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BiPIH) untuk tahun 2025. Sampai saat ini sebanyak 1.309 calon jamaah haji (CJH) Sidoarjo sudah melakukan pelunasan.

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Sidoarjo Khoidar mengatakan bahwa hingga kemarin (2/3), sudah ada 1.309 CJH yang melakukan pelunasan BiPIH di tahap pertama. "Jum-



lah tersebut adalah data sejak kita 14 Februari," katanya.

Khoidar mengatakan bahwa di Sidoarjo sudah ada 2.816 yang berhak melunasi BiPIH di tahap pertama. Sehingga ada sekitar 1.507 CJH yang

belum melakukan pelunasan. "Dari jumlah tersebut yang sudah *istithaah* ada 1.980 calon jamaah," ujarnya.

Untuk haji tahun ini, Sidoarjo mendapatkan kuota sebanyak 2.757 jamaah reguler. Sedangkan untuk kuota jamaah khusus atau lansia sebanyak 59 orang saja. Khoidar juga menyampaikan untuk cadangan keberangkatan haji tahun ini di Sidoarjo ada sebanyak 717 jamaah.

Jumlah tersebut naik dibanding 2.024 yang kuotanya hanya 2.478 jamaah. "Untuk saat ini kita fokus ke pelu-

nasan tahap pertama," katanya. Baru setelah pelunasan, Kemenag Sidoarjo akan menggenjot angka pengu-rasan paspor bagi CJH yang akan berangkat tahun ini.

Khoidar mengatakan untuk pelunasan BiPIH tahap pertama masih dibuka hingga 14 maret mendatang. Khoidar mengimbau CJH yang berhak melunasi dalam tahap pertama agar segera mengurus *istithaah* dan melakukan pelunasan. "Harapan kami bisa segera melunasi di tahap awal ini," ungkapnya. (eza/uzi)



Kita buka pelunasan BiPIH tahap pertama sejak 14 Februari. Saat ini sudah ada 1.309 jamaah melunasi. Masih ada waktu pelunasan tahap pertama hingga 14 Maret."

KHOIDAR
Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Sidoarjo

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Disperindag Siapkan Operasi Pasar Murah Ramadan



Selama Ramadan ini kami akan menggelar operasi pasar murah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok."

WIDIYANTORO BASUKI
Kepala Disperindag Sidoarjo

SIDOARJO - Di awal Ramadan ini, harga cabai di Sidoarjo mengalami kenaikan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo akan menggelar operasi pasar murah saat Ramadan.

Salah satu cabai yang mengalami kenaikan yaitu cabai merah besar.

Sejumlah pedagang mengungkapkan cabai merah besar mengalami kenaikan harga di awal Ramadan ini.

"Untuk cabai merah besar naik Rp 2.500 kemarin," ujar Amir salah satu pedagang

di Pasar Larangan. Awalnya, harganya Rp 47.500 per-kilogram, kini menjadi Rp 50 ribu per-kilogram.

Pria 40 tahun itu mengatakan di pedagang lainnya malah ada yang tembus Rp 60 ribu per-kilogramnya. Dirinya mengatakan, untuk harga cabai rawit merah sempat naik Rp 12.500 pada akhir Februari lalu. Harga cabai rawit bahkan sempat tembus Rp 97.500 per-kilogram.

"Tapi untuk saat ini turun lagi menjadi 85 ribu per-kilogramnya," katanya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo Widiyantoro Basuki mengakui harga capai memang ada kenaikan. Namun, dirinya mengatakan bahwa harga kebutuhan bahan pokok secara umum tidak ada kenaikan.

Harga bahan pokok masih naik turun sejak seminggu sebelum bulan Ramadan sampai kemarin. "Harga kebutuhan pokok masih fluktuatif, kecuali cabai saja yang naik," ucapnya. Sebagai antisipasi kenaikan harga bahan pokok selama

bulan Ramadan, pihaknya berencana menggelar operasi pasar murah selama bulan Ramadan. "Agar pengawasan harga bahan pokok di pasar bisa terpantau. Kami akan mengadakan operasi pasar dan pasar murah selama Ramadan," ujarnya.

Disperindag Sidoarjo juga bakal menggandeng Pemprov Jawa Timur dan Pemerintah Pusat untuk bersama mengantisipasi lonjakan harga. "Yang pasti operasi pasar murah digelar di bulan ini," katanya. (eza/uzi)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Komisi D DPRD Sidoarjo Harapkan PKH Benar-Benar Tepat Sasaran dan Berbasis Data Valid

Editor: Fathur Roziq

1 Maret 2025 09:59



Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori membantu Satuh yang hendak mengantre untuk dapat bantuan PKH di kantor Kecamatan Candi pada Kamis (27 Februari 2025). (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Politik & Pemerintahan



Aa

AA

KETIK, SIDOARJO – Pemerintah menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan uang tunai ini diharapkan tepat sasaran. Benar-benar terdistribusikan untuk masyarakat yang membutuhkan. Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sangat penting.

Kamis pagi (27 Februari 2025). Kantor Kecamatan Candi terlihat ramai. Ratusan warga duduk-duduk di kursi, lantai, hingga di bawah tiang Bendera Merah Putih. Usia mereka beragam. Ada yang tampak masih belia. Ada pula yang sudah lanjut usia (lansia).



Saat itulah terlihat Sukardi. Lelaki 50 tahun asal Desa Jambangan, Kecamatan Candi, itu tiba bersama cucunya. Naik sepeda motor roda tiga. Berdua. Sukardi mengaku dirinya menderita pengapuran tulang. Tidak bisa berjalan normal. Di antara ratusan warga lain, Sukardi tergolong penyandang disabilitas.

"Istri saya juga sakit seperti ini," ungkap Sukardi kepada Dhamroni Chudlori, anggota DPRD Sidoarjo asal Tulangan tersebut.



Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori berbincang dengan Sukardi yang baru tiba dengan sepeda motor roda tiga. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Tidak lama kemudian, muncul Satuah. Warga Desa Gelam itu terlihat berjalan tertatih. Keduanya tangannya memegang kruk. Perempuan berusia 52 tahun tersebut mengalami kesulitan saat hendak naik ke balai kecamatan.

Dhamroni lantas membantunya bersama seorang warga lain. Mengambilkan kursi agar Satuah bisa duduk. Dia pun berhasil masuk antrean. Menunggu giliran untuk memperoleh pencairan.

"Para penyandang disabilitas seperti ini harus mendapatkan prioritas layanan. Sangat layak dibantu," kata anggota DPRD Sidoarjo dari PKB itu.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori menghampiri mereka. Beberapa ditanya sedang apa. Semua menjawab tengah menanti giliran untuk menerima uang tunai bantuan dari PKH.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PKH merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program ini bertujuan mengentaskan masyarakat miskin, menaikkan taraf ekonomi, serta memutus mata rantai kemiskinan. Pencairan PKH dilakukan lewat bank pemerintah atau Kantor Pos.

Baca Juga:

Potensi PAD Sidoarjo Rp 5 Miliar dari Sewa Aset Melayang Tak Terurus

Sekitar 30 menit, Dhamroni Chudlori berada di antara antrean warga. Dia bertanya-tanya. Berapa nilai bantuan PKH yang mereka peroleh. Ada yang menjawab Rp 400 ribu. Ada pula yang sampai Rp 1,2 juta.

Yang membuatnya bertanya-tanya adalah beberapa penerima uang PKH itu ternyata masih berusia belia. Ada yang mengaku berumur 30 tahunan, bahkan baru sekitar 25 tahun atau 20 tahunan. Masih muda, tapi bukan usia anak sekolah lagi. Masih tergolong usia produktif.



Warga Kecamatan Candi yang sedang antre menunggu giliran dapat bantuan uang PKH pada Kamis (27 Februari 2025). (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Sebagian terlihat mengendarai sepeda motor yang relatif bagus. Ada pula lansia yang terlihat diantar anak-anaknya naik mobil. Di sisi lain, banyak warga yang sebenarnya berhak menerima. Sudah lama menunggu untuk dapat bantuan tersebut.

"Saya kira perlu ada verifikasi dan validasi data lagi terhadap penerima bantuan PKH ini. Agar diterima oleh yang benar-benar membutuhkan," ungkapnya.



Penerima bantuan PKH ini sudah tercatat dalam DTKS. DTKS adalah singkatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS merupakan sistem pendataan yang digunakan pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat.

Yang memasukkan data-data itu adalah operator desa. Petugas pencatat penerima PKH diharapkan lebih selektif dalam mengusulkan calon penerima bantuan sosial tersebut. Kalau memang sudah tidak memenuhi kriteria, sebaiknya nama mereka diganti oleh yang benar-benar memerlukan bantuan.

"Ada *update* data agar benar-benar valid," kata anggota DPRD Sidoarjo yang juga ketua Fraksi PKB tersebut.

Dia menyatakan yakin. Masih ada janda-janda miskin atau lansia yang membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah. Petugas pendataan dan operator desa diharapkan lebih selektif. Agar bantuan PKH itu dinikmati yang berhak.

Baca Juga:

[DPRD Sidoarjo Beri Empat Masukan Penting Pembangunan Sidoarjo, Apa Saja?](#)

Penerima bantuan PKH yang tergolong usia produktif sebaiknya dipertimbangkan lagi. Lebih-lebih warga yang sebelumnya tergolong miskin, tapi sekarang sudah tidak kekurangan lagi. Punya kendaraan bagus, pakaian bagus, tubuh masih sehat, dan sebagainya. Sebab, bantuan PKH ini bukan warisan yang bisa diberikan turun-temurun.

"Saya berharap peran Dinas Sosial Sidoarjo untuk melakukan validasi data ini. Termasuk, apakah penerima PKH juga memperoleh bantuan lain dari pemerintah," tambah Dhamroni Chudlori.

Pemerintah menetapkan lima kelompok penerima bansos PKH 2025. Ada beberapa kategori. *Pertama*, kategori kesehatan. Yang berhak menerima adalah ibu hamil. Wanita hamil yang tercatat dalam satu keluarga. Dengan jumlah maksimal dua kehamilan.

Selain itu, anak usia dini. Yaitu, anak berusia 0 sampai 6 tahun yang belum mengikuti pendidikan formal. Jumlah maksimal dua anak dalam satu keluarga.

Kedua, kategori pendidikan. Yang berhak menerima adalah anak sekolah dasar (SD/MI Sederajat). Mereka masih dalam usia sekolah dasar dan belum menyelesaikan pendidikan wajib. Selain itu, anak yang masih bersekolah di tingkat SMP/MTs sederajat dan SMA/MA sederajat.

Ketiga, kategori kesejahteraan. Mereka yang berhak menerima adalah orang lanjut usia. Berusia 60 tahun ke atas yang tinggal bersama keluarga atau secara mandiri. Selain itu, para penyandang disabilitas. Mereka adalah individu dengan disabilitas yang tergabung bersama keluarga atau tercatat sendiri.

Nilai bantuan uang yang diterima bergantung komponen masing-masing kategori tersebut. Satu keluarga bisa menerima bantuan yang nilainya berbeda dari keluarga lain. (*)





INFO MEDIA PERS

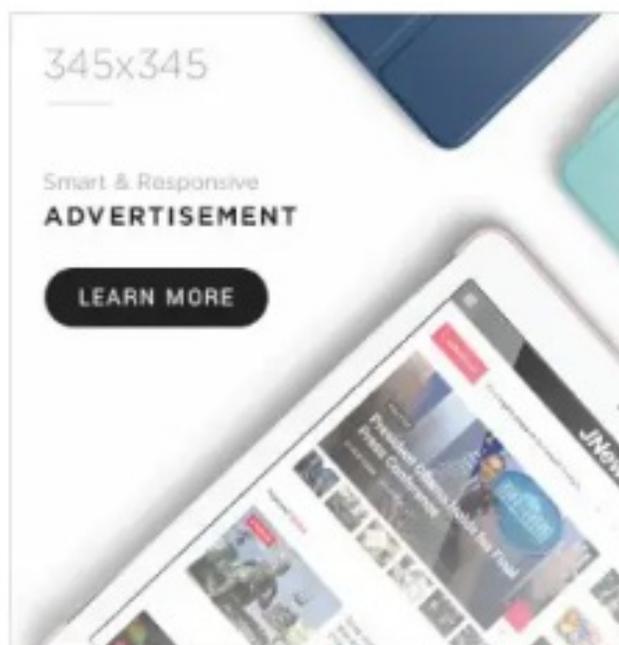
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2025, TPID Sidoarjo Siap Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok



Republikjatim.Com

Jumat, 28 Feb 2025 10:40 WIB



Sidoarjo (republikjatim.com) - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sidoarjo siap untuk menstabilkan harga dan pasokan barang kebutuhan pokok. Hal ini lantaran menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yaitu bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati mengatakan upaya ini dilakukan untuk pemantauan harga, memastikan kebutuhan tersedia, menjaga bahan pokok dan bahan penting, melaksanakan operasi dan sidak pasar serta memantau distributor barang agar tidak ada penimbunan barang.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

"Selain berkoordinasi dengan penghasil komoditi, untuk kelancaran pasokan dan kalau sangat mendesak dalam mengendalikan inflasi dibutuhkan bantuan transportasi dari APBD," ujar saat membuka acara High Level Meeting di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (27/02/2025).



Fenny juga menghimbau untuk lebih fokus memikirkan masyarakat dan TPID harus bergerak cepat dalam memasuki bulan Ramadhan. Apalagi, jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.

"Belum lagi saat ini Kabupaten Sidoarjo sedang dalam mengalami bencana banjir. Kondisi seperti ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat Sidoarjo. Mari kita bergandeng tangan menstabilkan harga dan mencari bantuan bagi yang terkena musibah dengan menjalin komunikasi dengan industri-industri yang siap membantu," ungkapnya.

Fenny juga berharap TPID mampu merefresh bekerja sama dengan daerah lain dalam mencukupi kebutuhan pokok seperti Kabupaten Blitar dengan pasokan telurnya. Serta mengajak masyarakat membeli hasil panen petani dari Sidoarjo sendiri.

"Begitupun ketika berbelanja kebutuhan bahan pokok harus dilakukan di Sidoarjo sendiri. Karena hal ini bisa meminimalisir gejolak-gejolak yang ada kalau terjadi inflasi," tegasnya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sidoarjo, Harga Eceran Tertinggi (HET) kebutuhan pokok masih stabil. Yakni dari hasil pemantauan perkembangan harga pokok pada Aplikasi Indago (Informasi Data Perdagangan Sidoarjo) perhari Kamis (27/02/2025) dapat diketahui Minyak Goreng pada harga 18.705/liter, Beras Premium Rp.15.250/kg, Beras Medium 13.062/kg, Gula Rp. 17.384/kg, Telur ayam ras Rp. 28.766/kg, dan daging ayam ras Rp. 36.142/kg, sedangkan Daging Sapi Rp.109.800/kg.



Sementara Dinas Pangan dan Pertanian Pemkab Sidoarjo untuk menstabilkan harga jelang HBKN puasa Ramadhan dan Idul Fitri 2025 akan melaksanakan operasi pasar pangan murah yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan. Terutama, khususnya minyak, gula konsumsi, daging dan beras dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Selain itu, juga mengadakan Gerakan Pangan Murah (GPM) setiap hari Senin sampai Kamis yang dimulai pada 10 Maret sampai 24 Maret 2025 yang bekerja sama dengan Bulog, ID Food, PG. Candi, PT. Charon, Japfa, Importir, Pengusaha Pangan Sidoarjo, Bumdes dan Poktan (Gapoktan) serta para ternak.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sedangkan laporan ketersediaan dari Perum Bulog Kancab Surabaya per 27/02 untuk komoditi Beras dalam negeri total tersedia 2.706.505, beras luar negeri 115.144.909, gula 74.492, minyak goreng 55.051 semua dalam satuan kilogram.

Sementara dalam kesempatan ini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo, Mahmud menyampaikan akan digelar rapat kembali untuk menyusun strategi dalam menindaklanjuti jika kemungkinan adanya fluktuasi harga serta kemungkinan terjelek dampak dari inflasi harga.

"Upaya kami juga mengerahkan satgas pangan untuk mendeteksi kemungkinan ada penimbunan-penimbunan bahan pokok," tandasnya. Ary/Waw



Komisi C DPRD Anggarkan Rp 35 Miliar Atasi Banjir Sidoarjo



by **ZonaJatim00** — 28 Februari 2025 in Daerah



0 SHARES / 24 VIEWS

Share on Facebook

Share on Twitter



Zonajatim.com, Sidoarjo – Komisi C DPRD Sidoarjo menganggarkan sedikitnya Rp 35 miliar, khusus untuk penanganan banjir.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Anang Siswandoko mengatakan dari anggaran yang besar tersebut diharapkan bisa mengatasi permasalahan banjir di Kota Delta. "Kami ingin 2025 ini sudah tak ada lagi banjir," kata Anang Siswandoko usai sidak banjir di Desa Balonggabus Kec Candi, Jumat (28/2/2025). Ikut dalam sidak tersebut anggota Komisi C yakni M Abud Asyrofi (PKB), M Nizar (Partai Golkar) dan Zakaria Dimas Pratama (Partai Nasdem).

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Anggota Komisi C Zakaria Dimas saat berdialog dengan seorang ibu yang rumahnya kebanjiran

Anang mengatakan ada tiga fokus pekerjaan dari anggaran yang telah ditetapkan tersebut. Politisi Partai Gerindra ini menerangkan fokus tersebut berupa normalisasi sungai, peninggian bantaran termasuk penertiban bangunan liar, dan pembangunan dam/pintu air.

Normalisasi sungai menjadi hal pokok karena sungai-sungai yang melalui Sidoarjo mengalami pendangkalan hebat. Bahkan, pendangkalan itu tak hanya disebabkan material lumpur dan pasir, melainkan karena sampah.





Wakil Ketua Komisi C Anang Siswandoko dan M. Abud serta M. Nizar saat sidak banjir

Selain mengeruk dasar sungai, lanjutnya, peninggian bantaran juga perlu dilakukan karena yang saat ini terjadi ketinggian air sungai pada waktu normal sudah hampir sejajar dengan tinggi bantaran. "Penambahan dam juga perlu untuk mengatur aliran air," sambungnya.

Kami mengusulkan pembangunan dam dan pintu air di tiga titik, yakni Jabon, Waru dan wilayah Kota Sidoarjo, tambahnya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo M Nizar menambahkan pihaknya meminta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) kabupaten Sidoarjo untuk serius dalam mengatasi masalah banjir di Sidoarjo. "Seharusnya bupati mendorong Dinas terkait atasi banjir di Sidoarjo seperti di Candi dan Tanggulangin. Salah satunya dengan membangun sudetan yang dapat dbuang ke hilir," katanya.

Politisi Partai Golkar ini juga meminta Pemkab Sidoarjo untuk membangun Afour dan embung di wilayah yang rawan banjir. "Memang harus dibangun Afour dan embung yang banyak, insyaallah Sidoarjo bebas banjir,"ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo dari Fraksi NasDem, M Zakaria Dimas Pratama, menilai bahwa permasalahan banjir harus ditangani dengan kebijakan yang lebih sistematis, termasuk peningkatan anggaran untuk infrastruktur dan pengelolaan sampah.

Menurut Dimas, salah satu penyebab utama banjir adalah minimnya kesadaran masyarakat yang masih sering membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai.

Sebagai solusi, Dimas mengusulkan pengadaan ekskavator di setiap kecamatan, yang akan digunakan secara rutin untuk membersihkan sedimentasi dan sampah di sungai, bukan hanya saat musim hujan tiba. Selain itu, ia juga mendorong pembentukan kader lingkungan di tingkat RT, yang bertugas mengawasi kebersihan sungai dan lingkungan sekitar meski nantinya diberikan insentif.

Disisi lain, anggota Komisi C DPRD Sidoarjo M Abud Asyrofi dari PKB mendorong Pemkab terus melakukan normalisasi sungai yang mencakup pembersihan aliran air, perbaikan tanggul, dan pengaturan ulang alur sungai agar aliran air tetap lancar dan terkendali. "Karena banyak sungai di Sidoarjo mengalami pendangkalan karena tumpukan sampah maupun enceng gondok," katanya.

Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk memastikan rumah pompa dan pintu air berjalan normal. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo harus siap siaga. "Dengan memastikan semua infrastruktur ini berfungsi optimal, risiko banjir dapat diminimalisir," ungkapnya. pr



Potensi PAD Sidoarjo Rp 5 Miliar dari Sewa Aset Melayang Tak Terurus

Editor: Fathur Roziq

2 Maret 2025 06:24



Anggota Badan Anggaran DPRD Sidoarjo Bangun Winarso. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Politik & Pemerintahan



Aa

AA

KETIK, SIDOARJO – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo mendesak Pemkab Sidoarjo mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sewa aset barang milik daerah. Salah satunya, sewa aset berupa saluran irigasi oleh kantor maupun perusahaan. Potensinya mencapai Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar per tahun.

Anggota Badan Anggaran DPRD Sidoarjo Bangun Winarso menyatakan, saat ini banyak sekali aset Pemkab Sidoarjo yang digunakan oleh pihak swasta. Misalnya, saluran irigasi. Di atas saluran irigasi itu didirikan bangunan jembatan atau fasilitas milik swasta. Terutama, Perusahaan-perusahaan swasta.

“Nah, pengguna saluran irigasi itu wajib membayar sewa kepada pemerintah daerah,” ungkap anggota DPRD Sidoarjo dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Menurut Bangun Winarso, sewa saluran irigasi itu sangat potensial menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). PAD ini sangat bermanfaat jika dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Misalnya, membangun gedung sekolah, menambah insentif tenaga kesehatan, maupun pengobatan gratis. DPRD Sidoarjo sangat konsen pada kepentingan masyarakat itu.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bangun Winarso yang anggota DPRD Sidoarjo asal Krian itu menjelaskan, sewa saluran irigasi itu merupakan pengganti retribusi pembayaran penggunaan saluran irigasi yang selama ini sudah berlaku. Sistem retribusi telah diganti dengan sistem sewa.

Hal itu diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan daerah ini juga didasari oleh Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) No. 1 Tahun 2022.

Baca Juga:

[Dorong Industri Kreatif Era Digital, Ubaya Resmi Luncurkan Prodi DKV](#)

Informasi yang diperoleh *Ketik.co.id* menyebutkan, tarif sewa barang milik daerah (BMD) itu dilakukan dengan sistem kontrak. Contohnya sewa saluran tersier di Desa Masangan Kulon, Kecamatan Sukodono.

Penyewa bernama PT JDI. PT JDI menggunakan saluran tersier itu perlintasan atau jembatan perusahaan. Biaya sewa dibayar lunas pada 2023. Harga sewa Rp 5.310.000 untuk luas lahan 236 meter persegi.

Ada pula sewa BMD berupa saluran anak Avfour Bulubendo di Desa Bangah, Kecamatan Gedangan. PT AI menggunakannya untuk jembatan perusahaan. Luas BMD yang digunakan mencapai 2.100 meter persegi. Harga sewa dalam kontrak tercatat Rp 186.900.000. Biaya sewa BMD itu dibayar lunas pada 2023.

Namun, menurut Bangun Winarso, Banggar DPRD Sidoarjo menemukan fakta. Bahwa tidak semua perusahaan mau membayar sewa BMD milik Pemkab Sidoarjo itu. Buktinya, ada Perusahaan besar di Sidoarjo yang menunggak pembayaran sampai sekarang. Nilainya tidak tanggung-tanggung. Mencapai Rp 980 jutaan. Masih banyak pula perusahaan lain yang belum membayar sewa itu.

Akibatnya, lanjut wakil ketua Komisi D DPRD Sidoarjo itu, perolehan PAD dari sewa saluran ini tidak optimal. Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air BM SDA) Sidoarjo beralasan penarikan biaya sewa membutuhkan rekom teknis (rekomtek).



Kendalanya ada di rekomtek itu. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo pun tidak bisa menarik biaya sewa. Jadi, PAD dari sewa BMD saluran irigasi itu tidak optimal. Jauh dari potensi Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar per tahun. Banggar DPRD Sidoarjo menilai potensi harus dioptimalkan.

Sebagai anggota Banggar DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso mendesak Pemkab Sidoarjo agar mengerjakamkan penyusunan rekomtek untuk sewa aset itu ke pihak ketiga saja. Dengan begitu, biaya sewa aset daerah bisa segera ditarik oleh BPKAD Sidoarjo. Potensi yang cukup besar itu tidak dibiarkan melayang begitu saja.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Istri Bupati Sidoarjo Hj. Sriatun Resmi Dilantik Sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo

Media Sorot Mata 2 Maret 2025



SIDOARJO/MEDIASOROTMATA.COM - 36 Ketua TP PKK kabupaten/kota di Jawa Timur dilantik Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu, (2/3/2025). Salah satunya istri Bupati Sidoarjo dr. Hj. Sriatun Subandi sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo. Pelantikan Ketua TP PKK kabupaten/kota tersebut dibarengi dengan pelantikan Ketua Tim Pembina Posyandu kabupaten/kota se Jawa Timur.

Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo Hj. Sriatun Subandi mengatakan program TP PKK Kabupaten Sidoarjo akan selalu selaras dengan program pembangunan Pemkab Sidoarjo. Disampaikannya TP PKK Kabupaten Sidoarjo akan terus menggerakkan dan memberdayakan keluarga sejahtera melalui 10 Program Pokoknya. Ia pastikan setelah pelantikan ini sinkronisasi dan kolaborasi program PKK dengan Pemkab Sidoarjo akan dilanjutkan. Terutama terhadap program prioritas Kabupaten Sidoarjo untuk 5 tahun kedepan.



"Kami akan terus besinergi dan menyinkronkan program PKK Sidoarjo dengan Pemkab Sidoarjo terutama Program prioritas Pemkab Sidoarjo untuk 5 tahun kedepan," tegasnya.

Sementara itu Bupati Sidoarjo H. Subandi yang hadir dalam pelantikan tersebut mengatakan Pemkab Sidoarjo akan mendukung penuh TP PKK Kabupaten Sidoarjo. Dikatakannya TP PKK merupakan mitra pemerintah. Sinergitas program-program TP PKK Sidoarjo dengan Pemkab Sidoarjo akan didukungnya. Program-program tersebut diharapkan dapat menyentuh langsung masyarakat Sidoarjo.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"TP PKK memiliki pendekatan langsung kepada masyarakat untuk ikut mensukseskan program pembangunan Kabupaten Sidoarjo, seperti yang dilakukan Dasawisma yang menjadi unit terkecil PKK dalam mendukung program pembangunan kita lakukan,"ucapnya.

Diakui Bupati Sidoarjo H. Subandi, keterlibatan TP PKK Sidoarjo terhadap program pembangunan Kabupaten Sidoarjo sangat terasa. Terbukti TP PKK Sidoarjo aktif dalam penanganan stunting maupun pelaksanaan Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH). Untuk itu keberadaan TP PKK Sidoarjo akan terus ia dorong untuk maju dan berkembang.

"Kita akan terus dorong TP PKK Sidoarjo untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan di Kabupaten Sidoarjo," tegasnya. (Nuri)

